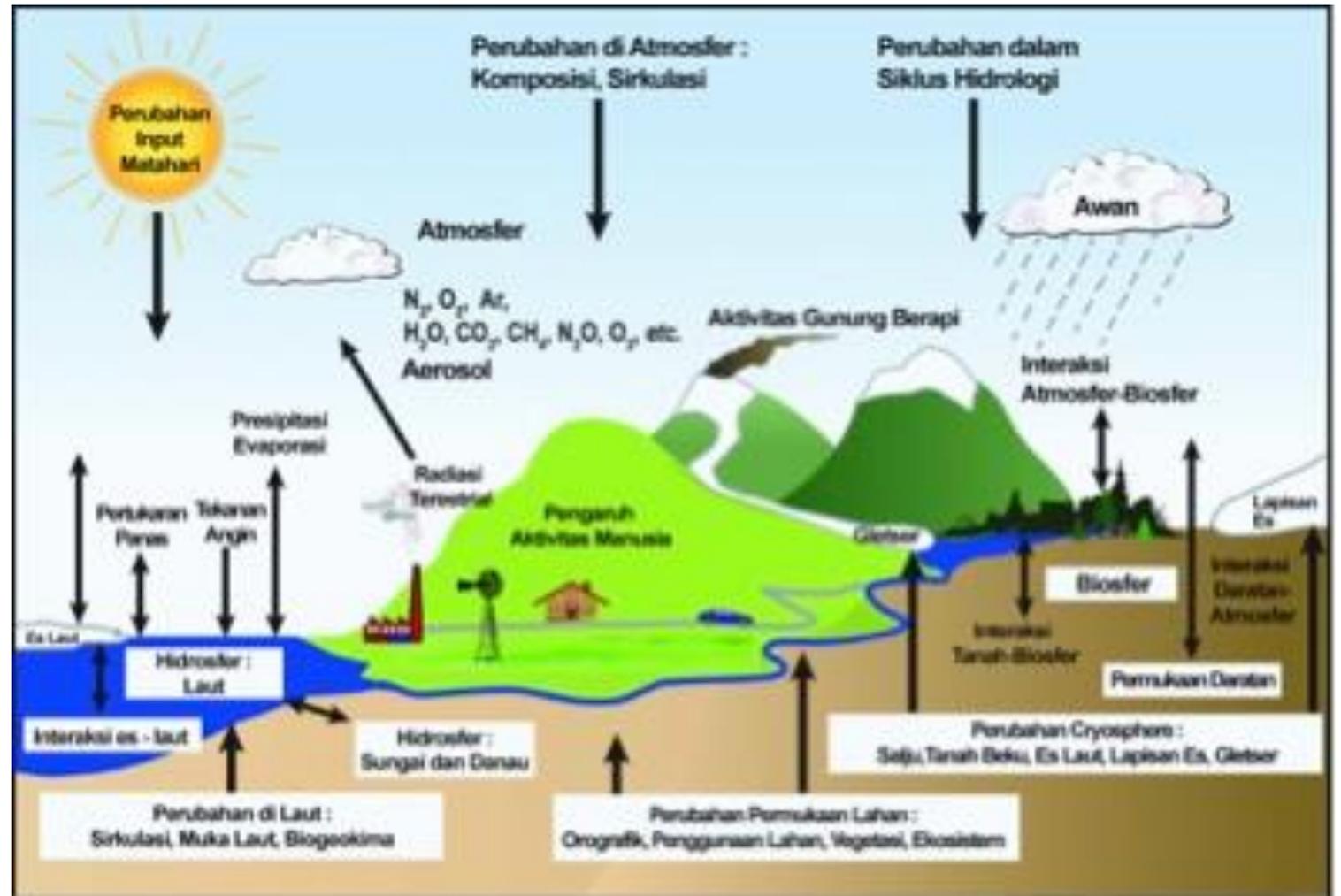


Oleh :
HARNE JULIANTI TOU

Dipresentasikan dalam
Acara DISKUSI PUBLIK -
WALHI

Padang, 29 November 2018



**KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG
DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM**

OUTLINE :

1. RENCANA TATA RUANG
2. HIRARKI dan RENCANA TATA RUANG
3. PENGENDALIAN RENCANA TATA RUANG
4. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
5. KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
6. REKOMENDASI

1. RENCANA TATA RUANG

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

RTRW sebagai Rencana yang Bersifat Umum

Rencana umum tata ruang adalah rencana resmi pemerintah.... berisi kebijakan utama mencapai wujud masa depan yang diinginkan dalam aspek fisik lingkungan (ruang wilayah).

- Kebijakan adalah pedoman umum untuk mengambil keputusan yang mengandung suatu komitmen.
- Kalau komitmen tidak ada, yang ada hanya janji-janji dan harapan saja, tetapi tidak ada rencana (unless commitment is made, there are only promises and hope, but no plans) (Peter F. Drucker)
- Komitmen artinya kemauan yang kuat untuk menanggung konsekuensi tindakan atas apa yang direncanakan/ ditetapkan.

Karakteristik dari rencana umum

- **fokus pada perencanaan fisik:** meliputi elemen fisik pembentuk ruang yang terkait.
- **berjangka panjang** : yang berarti rencana umum bervisi kedepan dengan mengidentifikasi kebutuhan masa depan.
- **komprehensif** :
 - merencanakan semua elemen fisik yang penting.
 - ada dasar kebijakannya, mengkaitkan rencana fisik dengan tujuan dan kebijakan ekonomi dan sosial.
- **bersifat umum:** menekankan rumusan isu utama atau ide besar yang bersifat skematis sebagai kerangka masa depan.

Rumusan kalau terlalu umum menyebabkan point yang ingin disampaikan menjadi abstrak dan kabur sementara kalau terlalu spesifik akan mengalihkan perhatian terhadap isu dan kebutuhan masa depan dalam jangka panjang (rencana detil spesifik disusun tersendiri)

Materi RTRW

Dokumen RTRW dengan materi:

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah berkaitan dengan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana

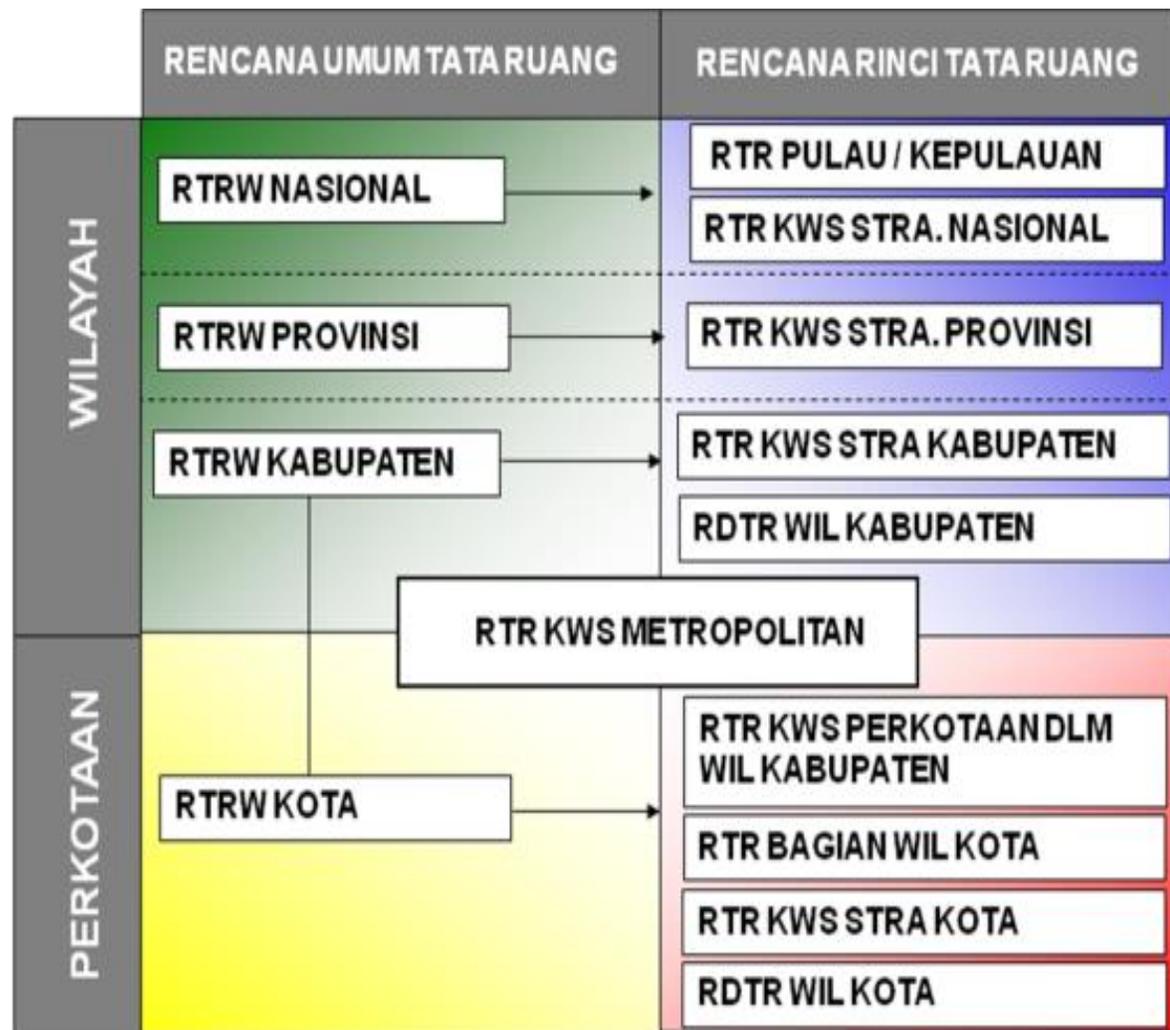
Rencana pola ruang wilayah berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya

Penetapan kawasan strategis dapat berada dalam satu wilayah administratif atau dapat juga berada pada lebih dari satu wilayah administratif

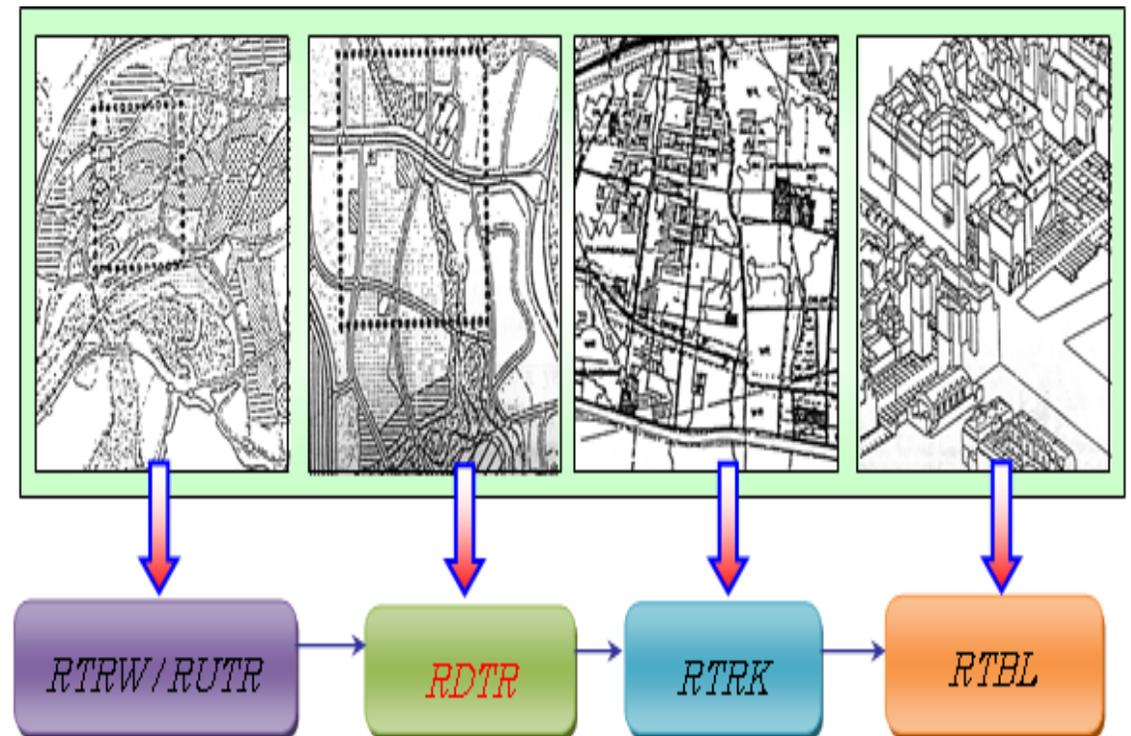
Arahan pemanfaatan ruang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, sanksi

2. HIRARKI DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG



Menurut UU no. 26 /2007 Penataan Ruang : produk rencana tata ruang di Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

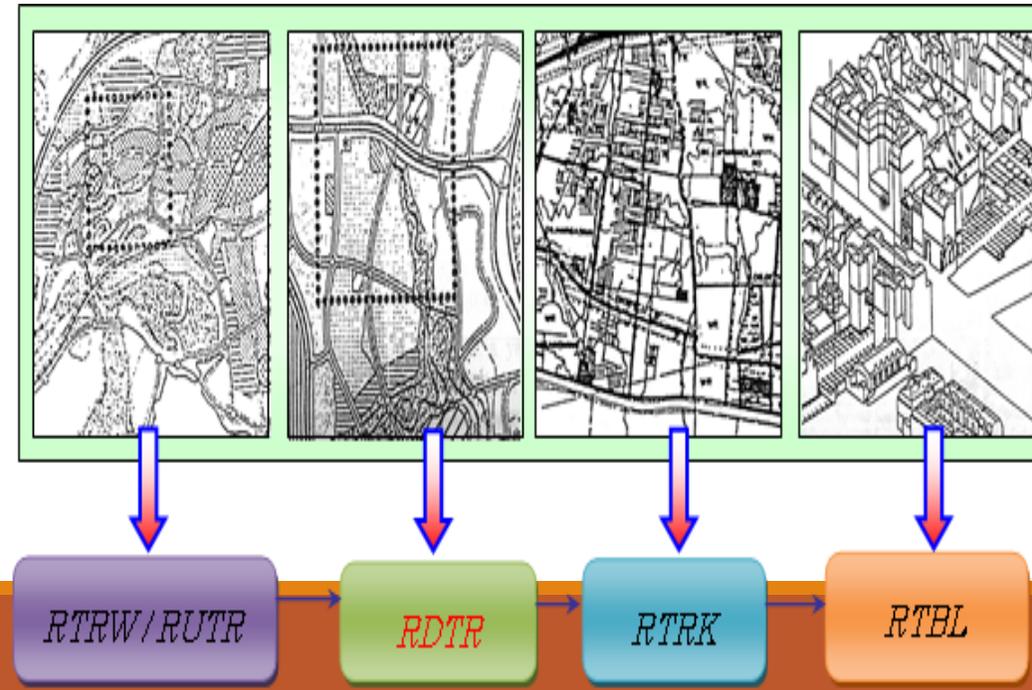


Muatan Rencana dan Kegunaannya

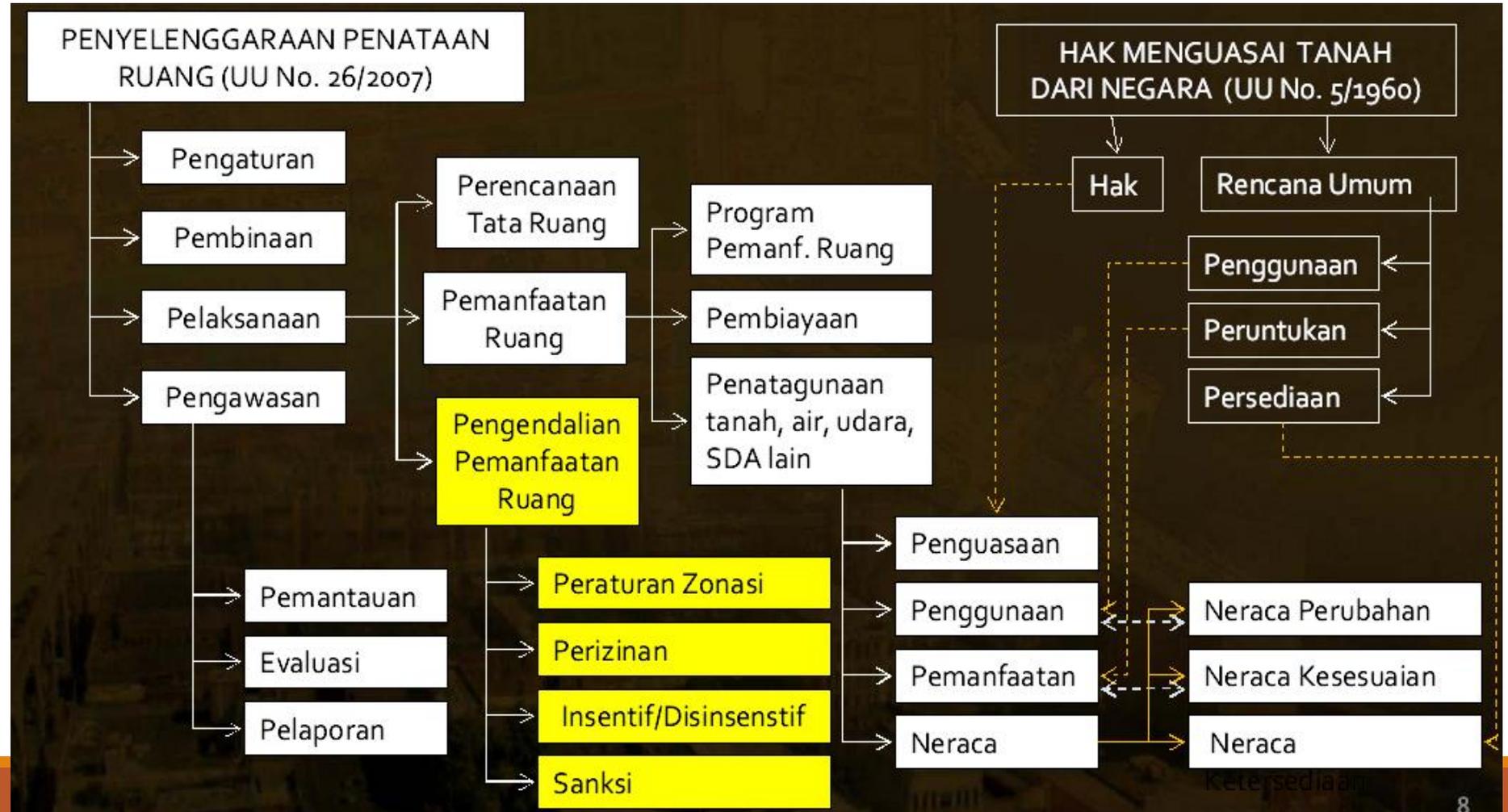
Rencana pola dan struktur ruang sebagai pedoman izin prinsip terdapat dalam **RTRW**

Rencana kawasan/blok sebagai pedoman izin site plan terdapat dalam **RDTR**

Rencana perpetakan sebagai pedoman IMB (**RTRK**)



3. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG



ISU PENGATURAN PERUNTUKAN LAHAN:

KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN

Kesalahan peruntukan lahan dalam dokumen rencana karena keterbatasan informasi:

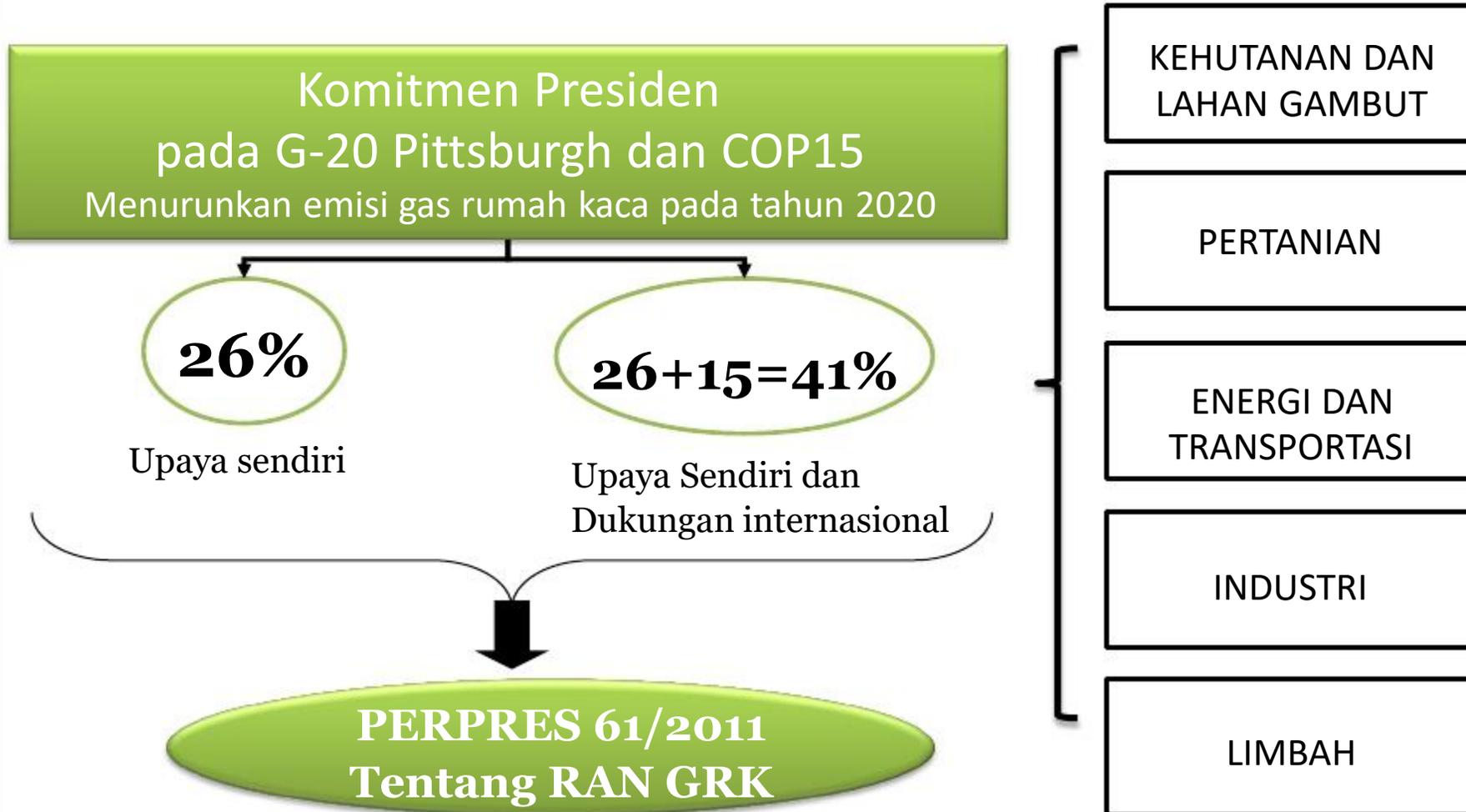
Lahan peruntukan kawasan hutan ternyata kenyataannya sudah ada ijin perkebunan.

4. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

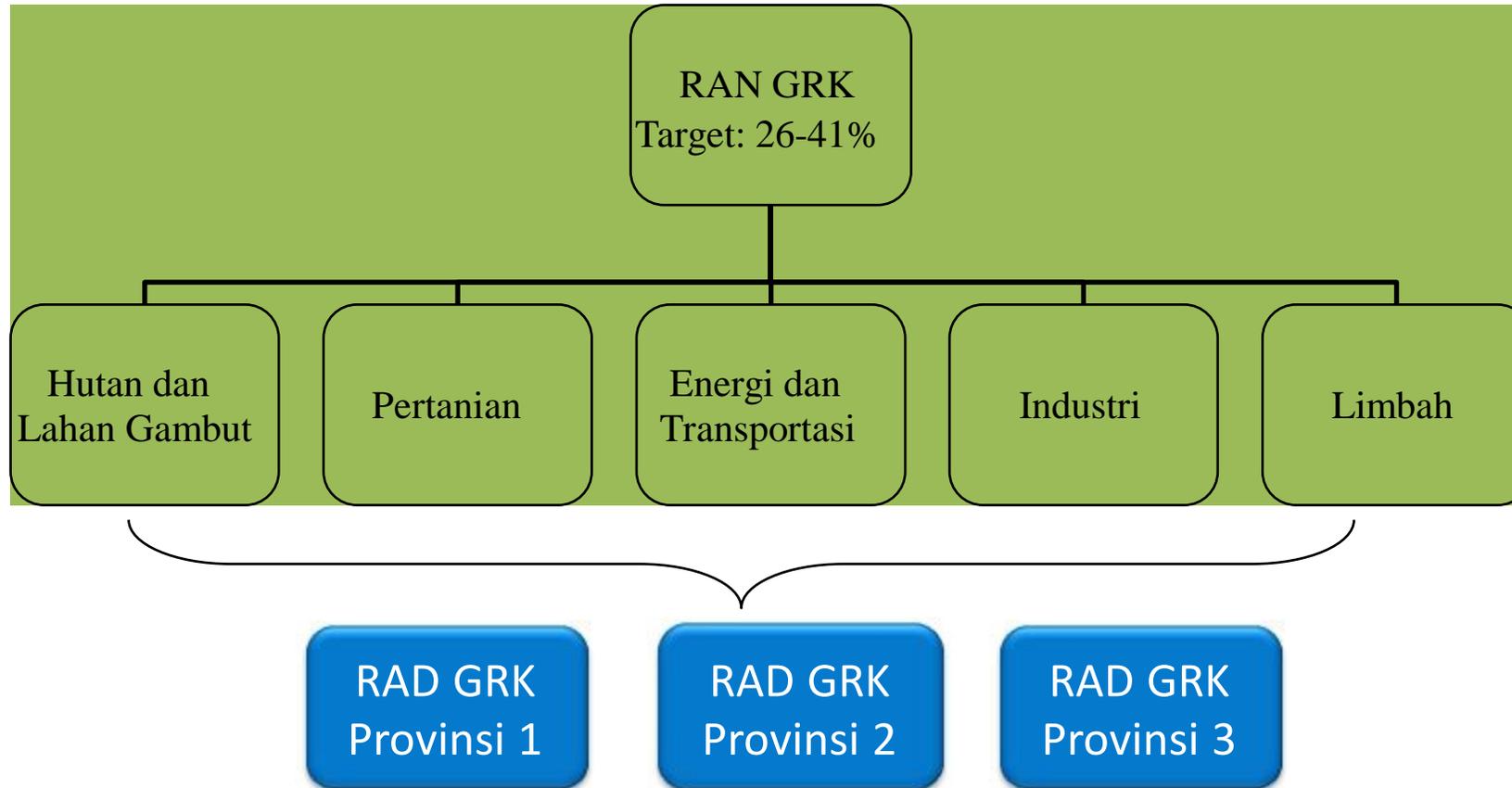
Adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber emisi.

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

RAN GRK adalah pedoman untuk langkah-langkah dalam memfasilitasi mitigasi perubahan iklim.

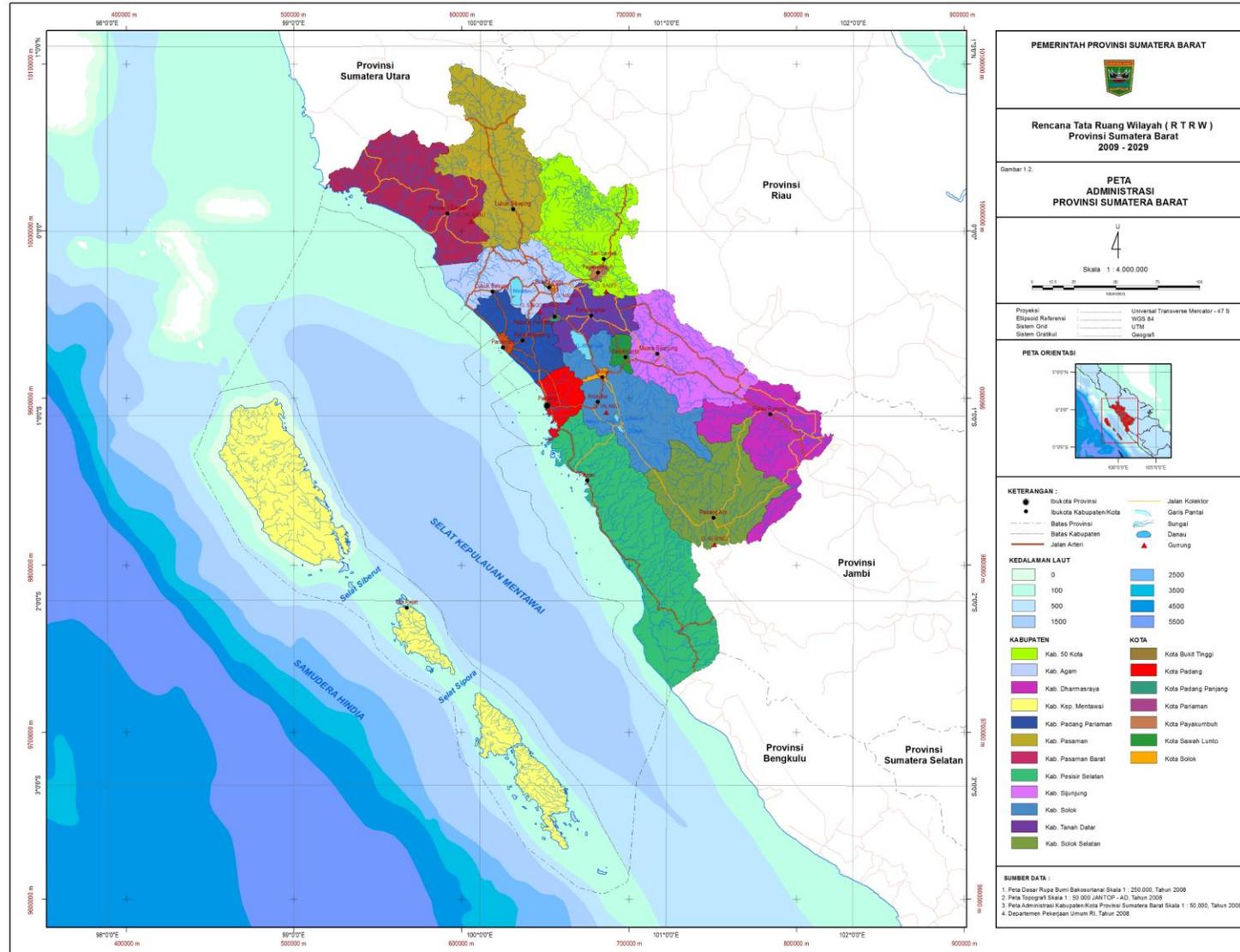


HUBUNGAN SINERGIS RAN-RAD GRK



RAD GRK adalah bagian dari RAN GRK

5. KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

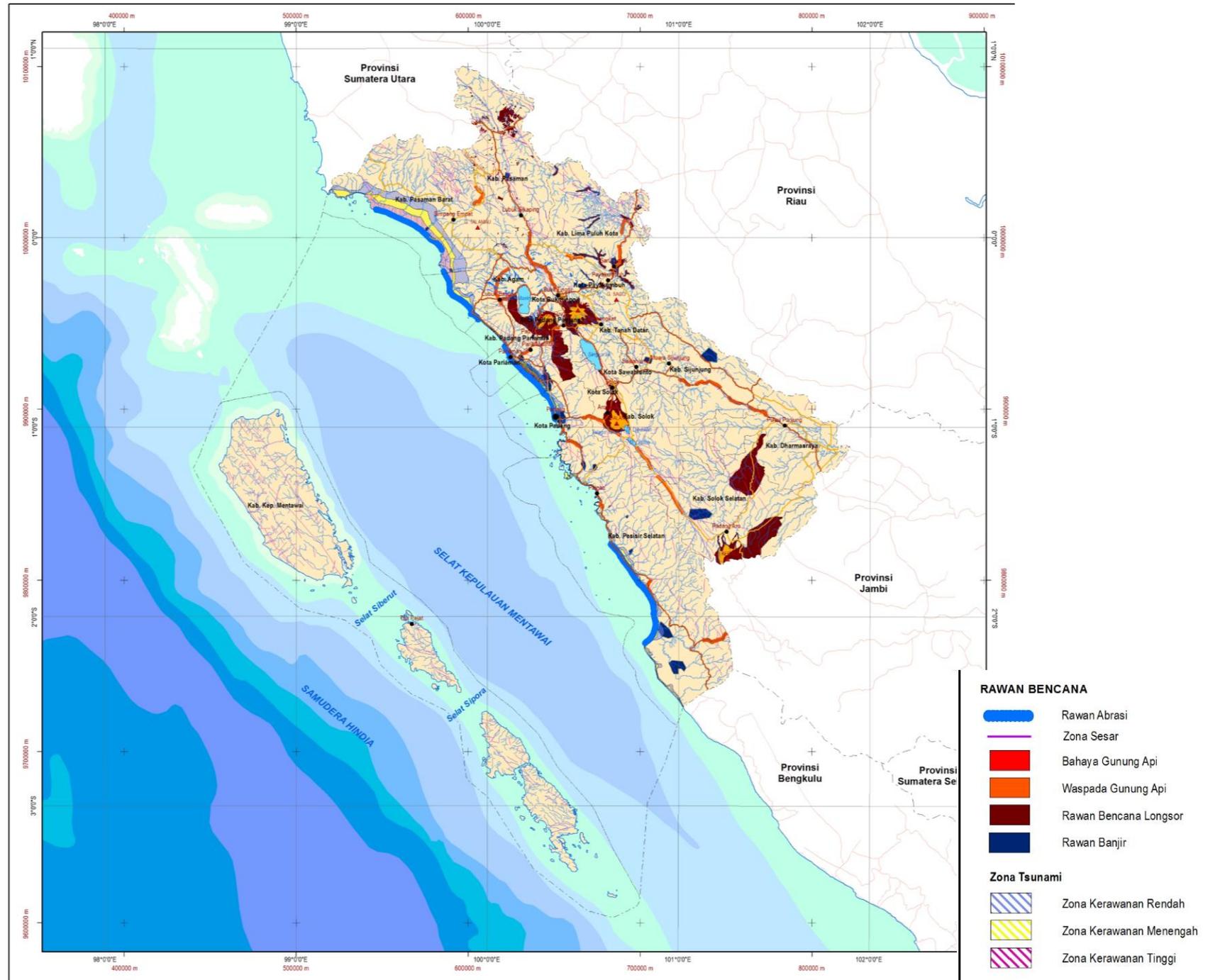


MENGAPA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH

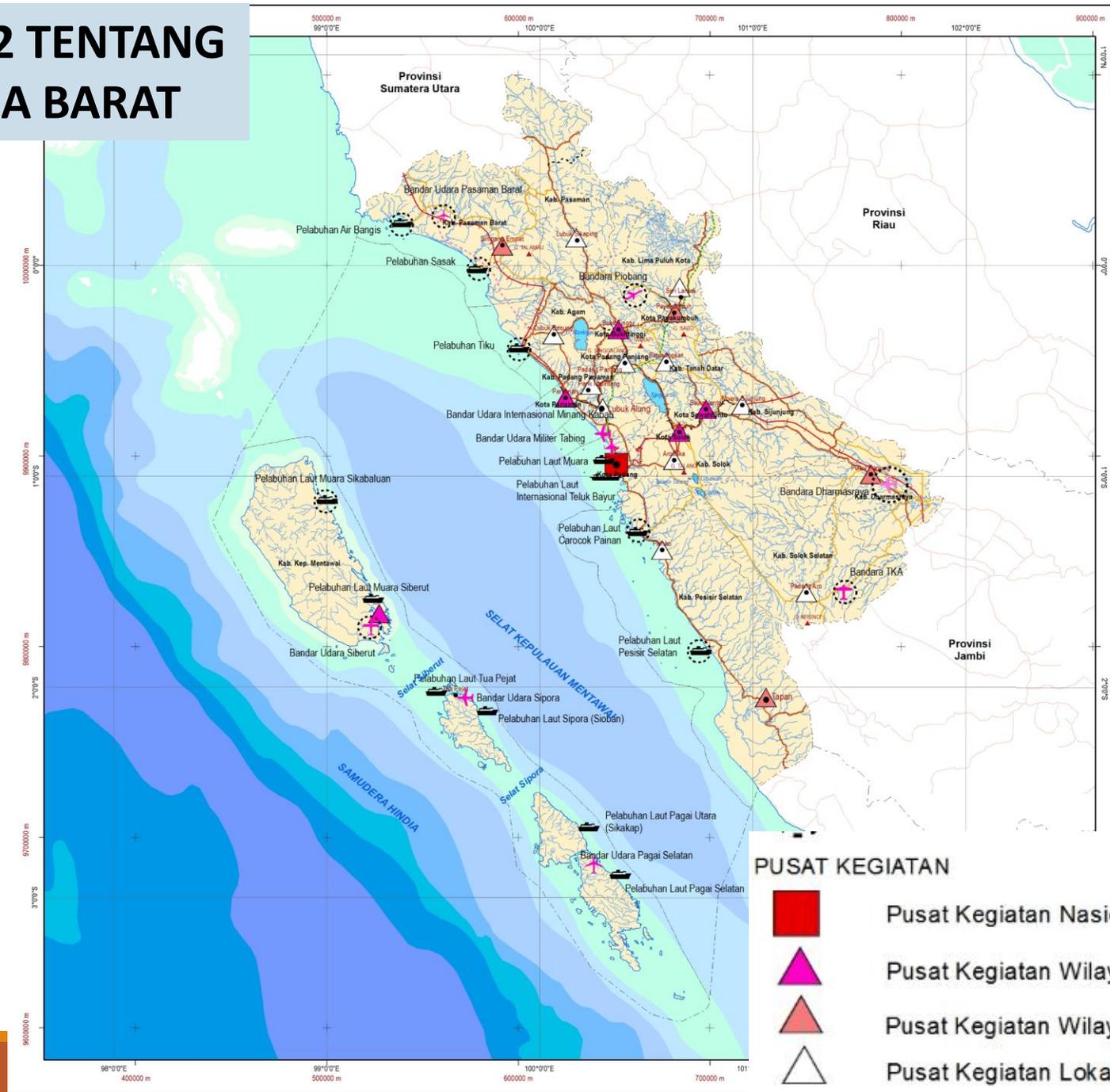
DDDT LH sebagai *core business* PPLH (UU 32 th 2009 PPLH)



DAERAH RAWAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT



PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG RTRW PROPINSI SUMATERA BARAT



PERDA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG RTRW PROPINSI SUMATERA BARAT

ZONASI KAWASAN LINDUNG

- Hutan Lindung
- Suaka Alam dan Cagar Budaya
- Permukaan Air

ZONASI KAWASAN BUDIDAYA

- | | |
|--|--|
| Hutan Produksi | Pertanian |
| Hutan Produksi Konversi | Lahan Belum Termanfaatkan |
| Hutan Produksi Terbatas | Calon Lokasi Transmigrasi |
| Industri | Lokasi Transmigrasi Yang Masih Ditempati |
| Permukiman | Lokasi Transmigrasi Yang Sudah Diserahkan |
| Perkebunan | |
| Persawahan | |
| Perairan Darat | |

ZONASI KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Keramba Jaring Apung.1E2
- Belum teralokasi.1A
- Budidaya Perairan.1E
- Hutan Hak Ulayat.1D2
- Perikanan Tangkap Komersial.1J
- Pertanian Lahan Basah.1C2
- Pertanian Lahan Kering.1C1
- Penangkapan Ikan Pelagis.1I2
- Penangkapan Ikan Pelagis.1J2
- Wisata Bahari.1F3
- Pariwisata.1F
- Perkebunan Rakyat.1C4
- Pertambangan Kelas C.1G2

- Perhubungan Laut Umum.1K1
- Perikanan Nusantara.1K2
- Perikanan Pantai.1K3
- Pangkalan Pendaratan Ikan.1K4
- Bandara.1L2

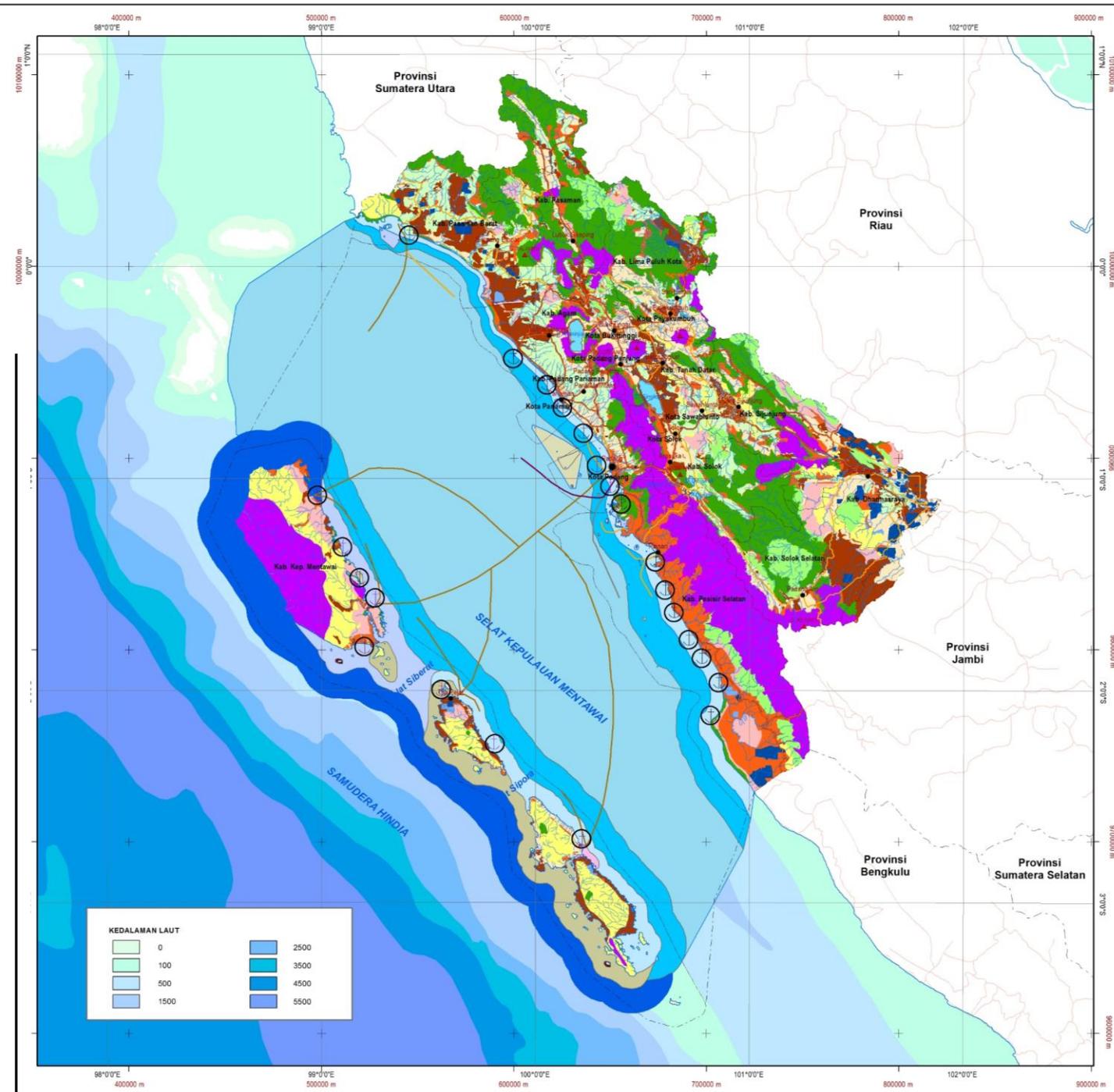
Kawasan Konservasi

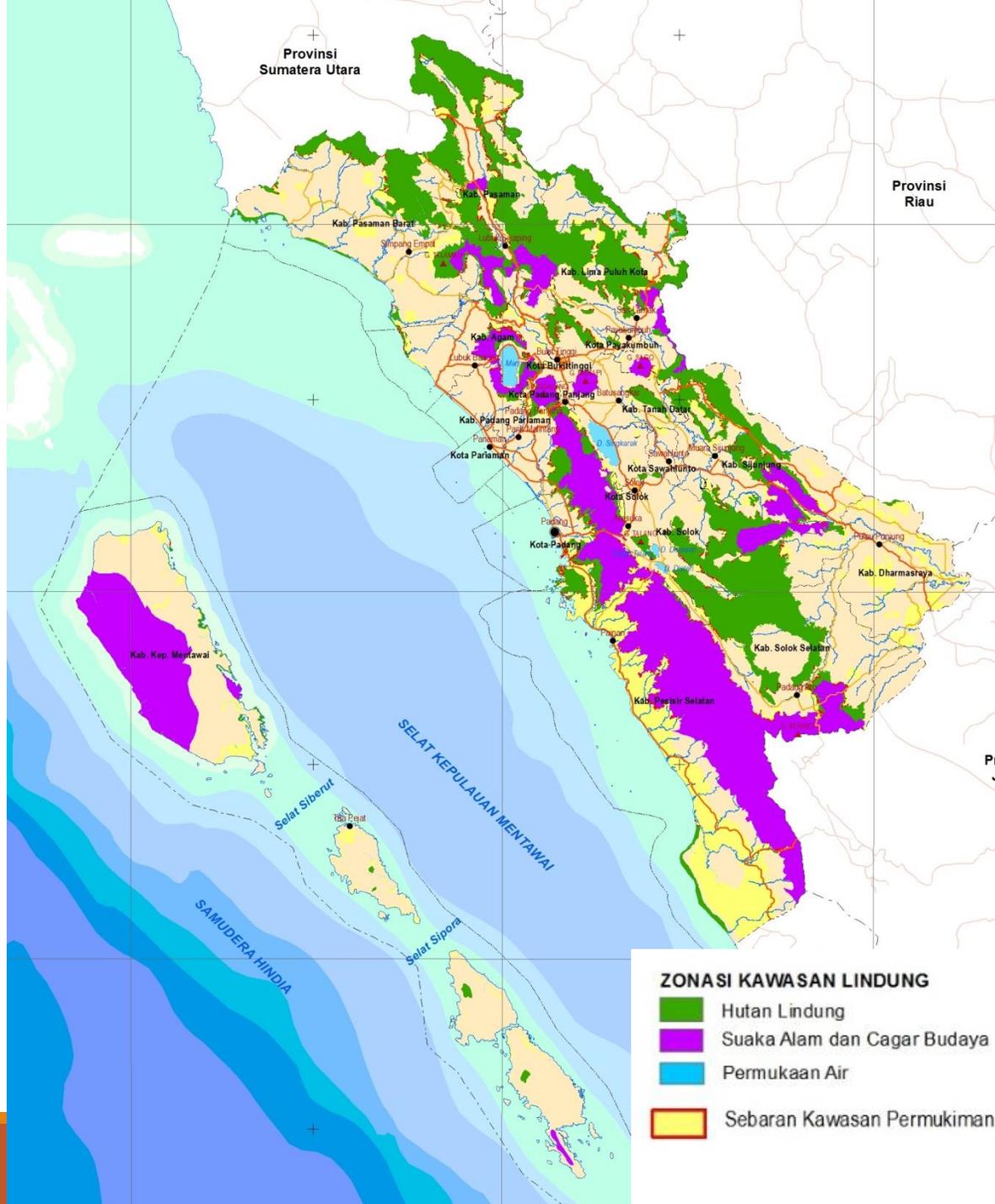
- Konservasi Maritim.2C
- Suaka Pesisir.2B1
- Suaka Pulau Kecil.2B2
- Taman Pulau Kecil.2B4
- Kawasan Pemukiman.1B3
- Kawasan Perkebunan.1C3
- Taman Wisata Perairan.2A2
- Konservasi Perairan.2A
- Sempadan Pantai.2D

Kawasan Strategis

- Pulau Kecil terluar.3B2
- Pelabuhan Kelas A.3C

- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran Internasional
 - Alur Pelayaran Nasional
 - Alur Pelayaran Regional
 - Alur Pelayaran Tradisional

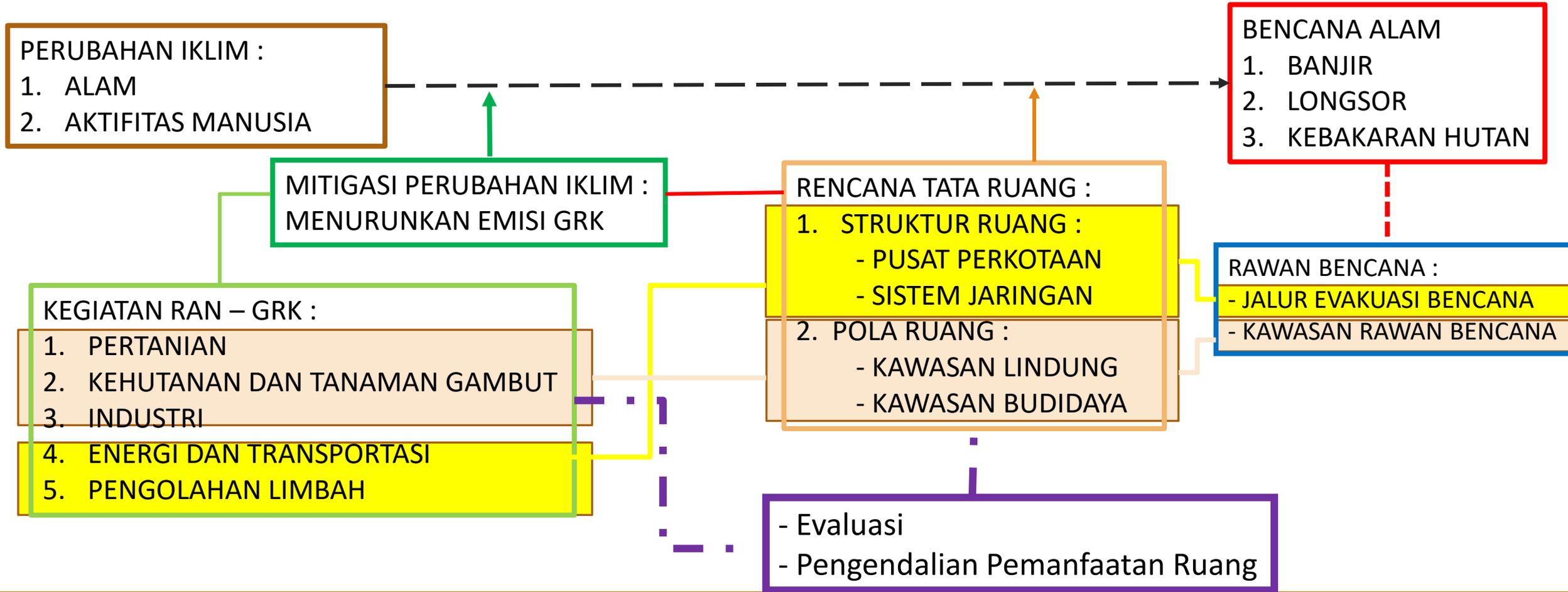




Peta Negative List

PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG RP3KP PROPINSI SUMATERA BARAT

5. KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



6. REKOMENDASI

1. Perlu menyiapkan base data yang lengkap, sehingga rencana yang dihasilkan bisa komprehensif
2. Rencana Tata Ruang sudah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup (rawan bencana, mitigasi perubahan iklim)
3. Pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring (pengendalian pemanfaatan Ruang)

TERIMA KASIH

WALHI

SUMATERA BARAT

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat

PIAGAM PENGHARGAAN

No : 014.194/SM/ED-WSB/XI/2018

Diberikan Kepada :

HARNE JULIANTI TOU, ST.,MT

Sebagai

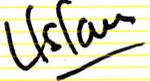
NARA SUMBER

Dalam kegiatan Seminar :

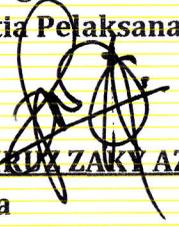
“Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sumatera Barat”

Dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VII WALHI Sumatera Barat 2018

Mengetahui
Eksekutif Daerah


USLAINI. SP
Direktur Eksekutif

Padang, 29 November 2018
Panitia Pelaksana


KHAIRUL ZAKY AZIZ. SP
Ketua